

Jurnal Ilmu Sosial
Mamangan
Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Jurnal Ilmu Sosial Mamangan
Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Reward Nagari Untuk Negeri

Penulis : Dian Kurnia Anggreta

Sumber : Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Diterbitkan Oleh : Laboratorium Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatera Barat

Untuk Mengutip Artikel ini :

Anggreta, Dian Kurnia,, 2016. *Reward Nagari untuk Anak Negeri*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5, Nomor 2, Juli Desember 2016: 69-78.

Copyright © 2016, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan
ISSN : 2301-8496 (*Print*), ISSN : 2503-1570 (*Online*)

Laboratorium Pendidikan Sosiologi
STKIP PGRI Sumatera Barat



Reward Nagari untuk Anak Negeri

Dian Kurnia Anggreta

Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Email : anggreta14@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the activities of Lembaga Peduli Pendidikan Pincuran Madok Pulang (LP3MP) in Nagari Taruang-taruang, Sub District IX Koto Sungai Lasi, regency Solok. This institution was established with Nagari Taruang-taruang communities, to identifying the social problems. One of the problems is low Human Resources. Increases Human Resources conducted with increasing education (human capital), to prepare young people to participate in community life. LP3MP Activities, giving reward to young people, who has accepted into state college (Perguruan Tinggi Negeri). This paper, conducted from qualitative research with descriptive type. Data collected through in-depth interviews, non participant observation and study of the document. The purpose of this study describes the process of reward giving to the younger generation since 2011 until now.

Keywords: *Community care education, community empowerment, Reward Nagari*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas kegiatan Lembaga Peduli Pendidikan Pincuran Madok Pulang (LP3MP) di Nagari Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Lembaga ini dibentuk bersama oleh masyarakat, dimulai dari mengidentifikasi persoalan yang dialami oleh masyarakat Nagari Taruang-taruang. Salah satu persoalan yang dirasakan oleh masyarakat adalah relatif rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Meningkatkan SDM dilakukan dengan meningkatkan pendidikan yang diyakini sebagai modal dasar manusia, untuk mempersiapkan generasi muda berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan LP3MP salah satunya memberikan reward kepada masyarakat yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Cara mengumpulkan data dengan wawancara mendalam, observasi non partisipan dan studi dokumen. Tulisan ini membahas awal munculnya gagasan dan proses pemberian reward yang telah diberikan sejak tahun 2011 sampai sekarang.

Kata Kunci: *Masyarakat Peduli Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, Reward Nagari*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian yang terpenting untuk menjaga keberlangsungan masyarakat. Emile Durkheim berpendapat, pendidikan membantu generasi muda mempersiapkan diri memasuki kehidupan

ditengah masyarakat yang memiliki tata nilai. Pendidikan juga dipandang sebagai *baby-sitting* agar masyarakat tidak memiliki perilaku menyimpang (*social deviat*). Pendidikan juga mempersiapkan generasi muda bisa berpartisipasi dalam masyarakat, yang memiliki

kompleksitas pembagian kerja, dan nilai-nilai kolektif. Dengan demikian pendidikan dipandang sebagai sebuah investasi, karena menurut Durkheim pendidikan berorientasi menyediakan *human capital* (modal dasar manusia) (Maliki, 2010).

Pendidikan adalah pengajaran karena pendidikan pada umumnya membutuhkan pengajaran dan setiap orang berkewajiban mendidik dan melakukan penanam nilai kepada orang lain (Firdaus, Yasin, & Anggreta, 2015). Di Indonesia, pendidikan memiliki tiga klasifikasi yang dimuat dalam ketentuan umum, UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan diklasifikasikan kepada pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (S. N. Republik Indonesia, 2003). Berdasarkan klasifikasi pendidikan formal, nonformal dan informal, pihak yang mendapatkan *human capital* (modal dasar manusia) adalah anak-anak atau generasi muda. Pemberi *human capital* pada pendidikan formal adalah guru/dosen, pada pendidikan nonformal adalah guru/pelatih dan sebagainya, serta pada pendidikan informal adalah orang tua serta masyarakat.

Kesemua pihak yang memberi *human capital* menganut prinsip “bank konsep” dimana mereka memberi “deposan” kepada anak-anak atau generasi muda (Maliki, 2010). Namun tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tidak hanya pada mereka, karena terdapat kewajiban besama orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dalam Pasal 11, UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah pusat dan daerah wajib memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara berusia tujuh sampai lima belas tahun (S. N. Republik Indonesia, 2003). Dapat dipahami penyelenggaraan pendidikan dasar yaitu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pendidikan dasar diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2008, tentang wajib belajar. Penyelenggaraan pendidikan dasar dilakukan tanpa memungut biaya, karena biaya operasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Fungsi wajib belajar untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia, serta memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (M. H. dan H. A. M. Republik Indonesia, 2008). Berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi, pemerintah pusat dan daerah juga mempunyai andil, namun tidak menanggung sepenuhnya biaya operasional ke dua jenjang pendidikan tersebut.

Perhatian pemerintah daerah dalam pendidikan diantaranya ditulis oleh Fajar Sidik dalam tulisannya yang berjudul Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta. Tulisan tersebut membahas tentang program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta yang menyediakan bantuan kepada para siswa yang berasal dari keluarga miskin, terdaftar dalam Kartu Menuju Sehat (KMS), agar dapat mengakses pendidikan pada jenjang TK sampai SMA. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program JPD belum efektif karena akses, bias, cakupan dan ketepatan layanan belum efektif dilaksanakan, disamping itu motivasi dan prestasi belajar siswa KMS relatif rendah (Sidik, 2015). Tulisan Fajar Sidik membahas implementasi program JPD yang dibuat Pemerintah Kota Yogyakarta, berdasarkan temuannya belum efektif, merupakan penelitian yang fokus pada peran pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bersifat *topdown*.

Berbeda dengan tulisan ini yang membahas kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga yang dibangun bersama oleh Masyarakat dan pemerintah Nagari (LP3MP) dalam mendukung pendidikan. Kegiatan yang dibuat LP3MP bukan berasal dari program pemerintah daerah, yang dikenal dengan pendekatan *bottom up*. Karena LP3MP berdiri dan merumuskan kegiatan berdasarkan identifikasi persoalan yang dialami masyarakat, dan merumuskan sendiri kegiatan yang dilakukan, untuk mengatasi persoalan

tersebut (Mendukung masyarakat melanjutkan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi).

Dukungan terhadap pendidikan yang dilakukan di Masyarakat Nagari Taruung-taruung Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, adalah dengan memberikan *reward* kepada masyarakat yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Masyarakat, Pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, bersama-sama membentuk LP3MP. *Reward* diberikan berbentuk uang senilai Rp 1.000.000 per masing-masing penerima (lulus seleksi PTN). Kegiatan pemberian *reward* tersebut telah dilakukan semenjak tahun 2011. Sebanyak 96 orang masyarakat (generasi muda) yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa di PTN telah menerima *reward*, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Penerima Reward Per Tahun

No	Tahun	Penerima Reward
1.	2011	11
2.	2012	13
3.	2013	27
4.	2014	16
5.	2015	16
6.	2016	13
Jumlah		96

Sumber: Dokumen LP3MP Nagari Taruung-taruung Kec. IX Koto Sungai Lasi, Kab. Solok, 2016

Pemberian *reward* menarik untuk ditelusuri karena wujud kepedulian masyarakat bersama pemerintah Nagari dalam bidang pendidikan guna Meningkatkan SDM. Berdasarkan temuan penelitian, penerima *reward* terbantu oleh kegiatan LP3MP tersebut, karena dapat dipergunakan untuk biaya registrasi pada PTN tempat yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi, serta digunakan untuk menambah biaya hidup. Penerima *reward* adalah masyarakat Nagari Taruung-taruung baik yang berdomisili di Nagari Taruung-taruung, dan keturunan¹ masyarakat Nagari Taruung-taruung, dalam tulisan ini disebut sebagai calon mahasiswa lulus seleksi PTN.

¹ Konsep keturunan di sini adalah anak-anak yang ayah atau ibunya berasal dari Nagari Taruung-taruung dimana mereka tidak tinggal di Nagari tersebut (merantau), namun mereka juga lulus seleksi penerimaan mahasiswa di PTN

Kegiatan pemberian *reward* ini digagas oleh masyarakat dan pemerintah Nagari, tidak muncul begitu saja. Gagasan ini muncul berdasarkan musyawarah bersama dalam mengidentifikasi persoalan yang dialami masyarakat dan solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam tulisan ini memfokuskan pembahasan tentang: Mendeskripsikan proses pemberian *reward* kepada Calon mahasiswa lulus seleksi PTN.

Aktifitas yang dilakukan oleh LP3MP yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah Nagari dalam tulisan ini disebut sebagai partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat meningkatkan sumberdaya manusia. Partisipasi dapat didefinisikan dengan berbagai sudut pandang, ada yang mendefinisikan sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Partisipasi juga dinyatakan sebagai “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Partisipasi juga dapat didefinisikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri (Mikkelsen, 2003). Definisi partisipasi pada prinsipnya merupakan keterlibatan masyarakat, namun keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat disini diklasifikasikan: pertama, terlibat dalam program yang dibuat oleh pemerintah *topdown*, kedua terlibat dalam kegiatan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Pemberian *reward* merupakan klasifikasi kedua.

Tulisan yang membahas tentang Pemberdayaan masyarakat Desa pernah ditulis oleh Ulumiyah et.al, dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa, studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Penelitian tersebut membahas peran dan upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan, serta membahas faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan terdapat tiga, yaitu: Peran sebagai pelaksana kebijakan, pelaksanaan program dan pembina dalam bidang ekonomi, kesehatan dan keagamaan. Untuk upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan Desa dengan mengaktifkan UPK (pinjaman dengan bunga rendah) serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan Desa. Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat ini adalah terdapat kerjasama Pemerintah Desa

dengan Swasta dan tersedia anggaran dana. Namun Faktor penghambat masyarakat Desa kurang berpartisipasi, budaya malas dan keterbatasan fasilitas pendukung dalam kegiatan (Ulumiyah, Gani, & Mindarti, 2013).

Pemberdayaan masyarakat juga pernah ditulis oleh Kurniawati et.al, yang berjudul, Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi; Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto. Tulisan tersebut membahas program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto dengan memberikan bantuan perorangan dan bantuan lembaga, dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat penerima bantuan. Yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat tersebut (Kurniawati, Supriyono, & Hanafi, 2013). Studi pemberdayaan juga dibahas oleh Firdaus dalam proyek pembangunan sosial di kawasan Hutan Mbeliling, NTT. Namun studi ini lebih menekankan perhatian pada evaluasi proyek pemberdayaan (Firdaus, 2016)

Tulisan *Reward* Nagari untuk Anak Negeri ini juga membahas tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Masyarakat bersama dengan pemerintah Desa (dalam tulisan ini disebut Nagari), namun tulisan Ulumiyah, et.al dan Kurniawati et.al memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi, sedangkan tulisan ini membahas pemberdayaan masyarakat pada bidang pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Agustus 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata lisan maupun tulisan, serta data perbuatan-perbuatan (Afrizal, 2008). Cara mengumpulkan data dengan wawancara mendalam, sehingga dapat menggali informasi tentang awal mula muncul gagasan serta proses pemberian *reward*. Observasi non partisipasi dengan mengamati kegiatan yang dilaksanakan LP3MP seperti pendataan calon penerima *reward*, pengumpulan donasi dan penyerahan *reward*. Selain itu juga dilakukan studi dokumen yang diperoleh dari pihak walinagari dan LP3MP.

Informan penelitian diperoleh secara Purposive, merupakan cara mendapatkan

informan dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang mesti dipenuhi pihak yang menjadi sumber informasi. Kriteria informan adalah: 1). Pengurus LP3MP dan 2). Terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemberian *reward*. Selain pengurus LP3MP juga diwawancarai Wali Nagari, pemuda, guru yang berdomisili di Nagari Taruang-taruang, penerima *reward*, serta keluarga penerima *reward*.

LATAR BELAKANG GAGASAN PEMBERIAN REWARD

Gagasan pemberian *reward* untuk calon mahasiswa lulus seleksi PTN ini muncul saat Musyawarah Nagari. Musyawarah tersebut diadakan oleh pemerintah nagari pada tanggal 28 Desember 2008 di Kantor Wali Nagari. Musyawarah dimulai jam 10.00 sampai 17.00 WIB tersebut dihadiri oleh 40 orang yang terdiri dari pihak Pemerintah Nagari, KAN, Bamus, guru yang berasal dan bertempat tinggal (berdomisili) di Nagari, pemuda dan masyarakat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pengurus LP3MP dan pihak nagari yang mengikuti Musyawarah sampai selesai berjumlah 18 orang.

Musyawarah tersebut membahas persoalan yang dialami oleh masyarakat. Pertemuan ini dimulai dengan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam proses pengidentifikasian ini peserta diminta untuk menyebutkan persoalan yang dialami oleh masyarakat. Muncul tanggapan dari peserta musyawarah seperti:

1. Kantor Wali Nagari kurang layak untuk melayani urusan administrasi masyarakat
2. Sumber daya manusia rendah
3. Produksi pertanian rendah
4. Masyarakat tidak mau memberikan tanah untuk pembangunan jalan
5. Tidak merata kepemilikan lahan

Tidak hanya mengidentifikasi persoalan yang terjadi di Nagari, dalam musyawarah tersebut diurai penyebab dan alternatif pemecahan. Semua peserta musyawarah mendapat kesempatan berpendapat dan menyampaikan usulan. Untuk lebih jelasnya persoalan yang diidentifikasi, penyebab dan alternatif yang diusulkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Hasil Identifikasi Persoalan Di Nagari Tarung-tarung

No.	Persoalan	Penyebab	Pemecahan
1.	Kantor Wali Nagari Kurang Layak	Bangunan relatif tua	Perbaiki kantor wali nagari
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) rendah	Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pendidikan
3.	Produksi pertanian rendah	Terdapat sawah tadah hujan, kondisi tanah dikategorikan kurang subur dan penggunaan bibit non unggul	Pembangunan aliran Irigasi, pengolahan tanah dengan pemupukan teratur, menggunakan bibit unggul
4.	Masyarakat tidak mau memberikan tanah untuk pembangunan jalan	Ketidak jelasan ganti rugi	Jelas aturan ganti rugi
5.	Tidak merata kepemilikan lahan	Bertambahnya jumlah penduduk dan migrasi pendatang	Peraturan Nagari tentang pengaturan pemakaian tanah

Sumber: Dokumen LP3MP Nagari Taruung-taruung Kec. IX Koto Sungai Lasi, Kab. Solok, 2011

Persoalan Kondisi Kantor Wali Nagari kurang layak untuk ditempati karena kondisi bangunan relatif tua, dari hasil pertemuan perlu ada perbaikan bangunan kantor dan akan diusulkan pembiayaan dari APBD. Sumber Daya Manusia rendah diyakini oleh masyarakat karena tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah dan pemecahannya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pendidikan. Ini yang menjadi fokus dalam tulisan dan diulas lebih lanjut dibawah ini. Produksi pertanian rendah penyebabnya terdapat sawah tadah hujan. Hal ini sesuai dengan temuan data penggunaan lahan bahwa sawah irigasi dengan luas 175 Ha, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan sawah tadah hujan seluas 363 Ha (Profil Nagari Tarung-tarung, 2015). Kondisi tanah kurang subur dan penggunaan bibit non unggul. Pemecahan persoalan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan memperbanyak aliran arigasi, pengolahan dan pemupukan secara teratur, serta pihak Nagari akan mengupayakan pengadaan bibit unggul dengan bekerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Solok, pada tanaman padi, jagung, kedele, kakao, manggis dan durian, yang merupakan komoditi tanam di Nagari ini. Persoalan masyarakat tidak mau memberikan tanah untuk pembangunan jalan, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari, beserta niniak mamak memberikan sosialisasi tentang jalan sebagai salah satu penunjang kegiatan ekonomi, serta memberikan kejelasan proses ganti rugi. Persoalan tidak meratanya kepemilikan lahan dalam pertemuan pemecahannya dengan membuat Peraturan

Nagari tentang pengaturan pemilikan lahan, namun belum ditemukan Peraturan Nagari tersebut dan sistem seperti apa yang akan diberlakukan.

Kembali kepersoalan SDM yang rendah, dalam Musyawarah tersebut disampaikan SDM rendah karena pendidikan dimiliki masyarakat relatif rendah. Masyarakat diharapkan memiliki pendidikan tinggi agar persoalan ini bisa diatasi. Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa tidak “terdengar” anak Nagari Taruung-taruung yang kuliah, karena tahun-tahun sebelumnya masyarakat masih mendapatkan informasi terdapat anak Nagari yang kuliah ke Perguruan Tinggi. Dari penelusuran, tidak ditemukan data masyarakat Nagari yang sedang kuliah, namun data yang ada menentukan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2007

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Sekolah Dasar	1.067
2.	Sekolah Menengah Pertama	689
3.	Sekolah Menengah Atas	271
4.	Perguruan Tinggi	35
Jumlah		2.062

Sumber: Profil Nagari Tarung-tarung tahun 2007

Berdasarkan data tabel 3 jumlah penduduk Nagari Tarung-tarung yang lulusan Perguruan

Tinggi sejumlah 35 orang. Namun belum membuktikan ada atau tidak, serta jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi tahun 2007 dan 2008. Pendapat peserta Musyawarah tentang tidak “terdengar” Masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Niniak Mamak dan pihak Pemerintah Nagari, karena kedua pihak tersebut memiliki akses dalam mengetahui informasi yang terjadi di Nagari termasuk masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

Persoalan rendahnya SDM di Nagari diyakini masyarakat karena tingkat pendidikan yang relatif rendah, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pendidikan dianggap sebagai modal bagi masyarakat sehingga kelak memiliki pengetahuan dan mampu memperbaiki perekonomian. Namun untuk mendapatkan pendidikan, hingga ke jenjang Perguruan Tinggi, masyarakat mengalami kendala, seperti:

1. Ketatnya seleksi masuk Perguruan Tinggi
2. Tidak punya biaya (Persoalan Ekonomi)

Kendala tersebut diurai agar menemukan solusi, sehingga persoalan ketatnya seleksi masuk Perguruan Tinggi masyarakat memberikan bimbingan belajar untuk siswa di Nagari Tarung-tarung. Sedangkan persoalan biaya memang belum sepenuhnya dirumuskan penyelesaiannya.

Musyawarah menghasilkan pengidentifikasian persoalan yang dialami masyarakat Nagari Tarung-tarung, penyebab dan pemecahan yang akan dilakukan. Proses pelaksanaan pemecahan dimulai pada tahun 2010, hal ini bukan berarti tidak ada pergerakan yang dilakukan semenjak Musyawarah Nagari tahun 2008. Relatif banyak terjadi pertemuan-pertemuan tokoh masyarakat dan Pemerintah Nagari. Dalam pertemuan dalam rentang waktu 2008 sampai 2010, muncul gagasan membentuk Lembaga yang diberinama Lembaga Peduli Pendidikan Pincuran Madok Pulang (LP3MP), yang menjadi wadah penyelesaian persoalan rendahnya SDM.

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEDULI PENDIDIKAN PINCURAN MADOK PULANG (LP3MP) NAGARI TARUANG-TARUANG

Menyelesaikan persoalan rendahnya SDM, dibentuk LP3MP Nagari Taruang-taruang pada tanggal 3 Juli 2010. Pembentukan tersebut

dilakukan dalam Musyawarah Nagari saat itu dihadiri oleh Pemerintah Nagari, KAN, Bamus, guru yang berdomisili di Nagari Tarung-tarung dan pemuda. Pertemuan ini yang kedua setelah tahun 2008. Musyawarah yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Nagari Tarung-tarung tersebut mencapai kesepakatan bahwa dibentuk LP3MP. Lembaga ini merupakan lembaga yang didirikan bersama yang konsen terhadap peningkatan pendidikan di Nagari Taruang-taruang. Lembaga ini diberinama Lembaga Peduli Pendidikan Pincuran Madok Pulang. Secara harfiah, Pincuran merupakan konsep lokal yang bermaksud air yang mengalir kebawah, ini dipahami sebagai pemberian atau pencerahan. Sedangkan Madok Pulang bertujuan menghimbau perantau untuk memberhatikan daerah asal. Dapat disimpulkan nama lembaga ini memiliki arti Lembaga peduli pendidikan yang dibangun masyarakat bersinergi dengan perantau bertujuan untuk memberi pencerahan bagi seluruh masyarakat.

Pertemuan tersebut ditetapkan kantor sekretarian LP3MP berkedudukan di Kantor Wali Nagari Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Kemudian dipilih pengurus LP3MP masa jabatan 2010-2015. Adapun nama pengurus tertera dalam tabel berikut:

Tabel 4
Pengurus LP3MP Nagari Taruang-taruang

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	H. Sjamsuardi, SE
2.	Ketua I	Drs. Syahrinal Kimin
3.	Ketua II	Drs. Djufrizal Wahab
4.	Ketua III	Arman, S.Pd
5.	Sekretaris	Drs. Syaharuddin
6.	Wakil Sekretaris	Zulkifli, A.Md
7.	Bendahara	H. Ali Amsar, AmaE
8.	Bidang Komunikasi & Informasi	Martison, S.Pd, M.Pd
9.	Bidang Pendidikan	Afdal Piyasmi, SSn
10.	Bidang Dana	Ir. Hendri Martius

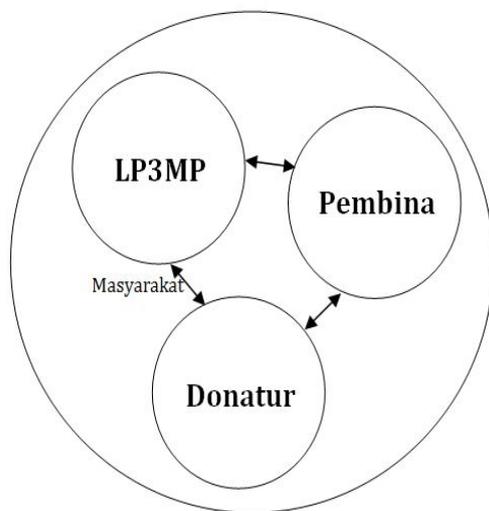
Sumber: SK Wali Nagari Tarung-tarung No: 19/ WN-2010, tentang Susunan Pengurus LP3MP

Dirumuskan pembagian tugas pada masing-masing pengurus, seperti tugas ketua mengkoordinir kegiatan LP3MP, memimpin rapat pengurus dan rapat umum. Sekretaris melaksanakan kegiatan administrasi. Bendahara membuat buku kas LP3MP, menerima uang dari donor dan membayarkan uang kepada penerima *reward* setelah disetujui oleh ketua. Bidang

Komunikasi dan Informasi memberikan informasi kegiatan LP3MP pada masyarakat Nagari Taruang-taruang dan perantau. Bidang Dana melakukan pengumpulan dana untuk mendukung kegiatan LP3MP. Bidang Pendidikan mengkoordinir kegiatan bimbingan belajar dan pemberian *reward*.

Pengurus LP3MP yang dijelaskan diatas merupakan merupakan struktur dalam tubuh LP3MP itu sendiri. Lembaga ini dalam melaksanakan kegiatan didukung oleh berbagai pihak, untuk lebih mudah memahami dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1
Stakholder Kegiatan Lembaga LP3MP



Fungsi LP3MP menjalankan kegiatan peduli pendidikan sesuai dengan tujuan didirikan lembaga tersebut, di Nagari Taruang-taruang. Pembina yang terdiri dari Pemerintah Nagari, KAN dan Bamus berfungsi memberikan pembinaan pada LP3MP. Donatur terdiri dari masyarakat dan perantau yang mendukung kegiatan dilaksanakan oleh lembaga, baik berupa materi, ide dan partisipasi.

Selain penetapan pengurus juga dirumuskan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Memberikan bimbingan belajar terhadap siswa Sekolah Dasar Kelas V dan VI, siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas untuk mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional
2. Memberikan bantuan bagi masyarakat Nagari Taruang-taruang yang diterima pada PTN di seluruh wilayah Republik Indonesia

3. Memberikan pinjaman kepada masyarakat Nagari Taruang-taruang kurang mampu yang di terima di PTN
4. Menumbuhkan rasa cinta bernagari bagi masyarakat Nagari Taruang-taruang
5. Menumbuh kembangkan keluarga peduli cinta pendidikan.

KEGIATAN LP3MP NAGARI TARUANG-TARUANG

Kegiatan yang dilaksanakan oleh LP3MP Nagari Taruang-taruang dimulai dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswa SD Kelas V dan VI, siswa SMP kelas IX dan SMA kelas XII. Bimbingan belajar ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan masing-masing jenjang pendidikan. Kegiatan pemberian bimbingan belajar diawali dengan pendataan siswa dan guru yang berdomisili di Nagari Taruang-taruang oleh pengurus bidang pendidikan. Pengurus juga bekerja sama dengan pihak sekolah seperti SMP N 2 Sungai Lasi, MTsN Sungai Lasi, SMA N 1 Sungai Lasi. Kerjasama bertujuan untuk membuat program pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki siswa. Kemudian dilakukan sosialisasi kepada guru dan siswa pada Agustus 2010. Dalam sosialisasi disampaikan kegiatan bimbingan belajar dan menyepakati waktu pelaksanaan bimbingan belajar. Matapelajaran yang diajarkan disesuaikan dengan mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional. Jumlah guru yang memberikan bimbingan belajar berjumlah 6 orang. Dan kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap sabtu sore dan minggu mulai tahun 2010.

Memberikan bantuan (*reward*) pada calon mahasiswa lulus seleksi PTN juga kegiatan tahunan yang dilakukan oleh LP3MP. *Reward* diberikan sebesar Rp1.000.000 kepada calon mahasiswa lulus seleksi PTN tersebut. Alasan diberikan *reward* berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, untuk membantu biaya melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Masyarakat menyadari seleksi penerimaan mahasiswa baru di PTN relatif ketat, karena sangat diminati. Diterima di PTN dianggap sebagai prestasi bagi masyarakat. Hal juga dibenarkan oleh ketua pengurus LP3MP, seperti kutipan wawancara berikut:

“Reward ini diberikan kepada masyarakat yang diterima di PTN, karena sulit untuk masuk PTN dan banyak pesaing. Masuk PTN lulus pertama ini sangat sulit, jika lulus berarti anak-anak kita ini merupakan anak berprestasi.”

Pemberian *reward* ini dilakukan sejak tahun 2011 sampai sekarang. Tujuan pemberian *reward* ini membantu masyarakat dalam membiayai melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Pemberian *reward* diyakini oleh pengurus belum membantu secara penuh biaya dalam melanjutkan pendidikan masyarakat Nagari Taruang-taruang ke Perguruan Tinggi. Namun dengan diberikan *reward* ini masyarakat terbantu, karena bisa menjadi tambahan biaya untuk registrasi di Perguruan Tinggi tempat mereka diterima, serta membantu biaya kebutuhan lainnya. Selain membantu bagi penerima *reward* bertujuan untuk menumbuhkan rasa bernagari pada masyarakat Nagari Taruang-taruang. Karena kegiatan ini melibatkan berbagai pihak seperti LP3MP, Pemerintah Nagari, KAN, Bamus, selaku pembina. Pendonor yang terdiri dari masyarakat Nagari Taruang-taruang dan para perantau. Sebagai pembina LP3MP, Pemerintah Nagari, KAN dan Bamus mendukung setiap kegiatan lembaga tersebut. LP3MP melaksanakan kegiatan agar tercapai tujuan tujuan memecahkan persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia di Nagari ini yang disebut.

PROSES PEMBERIAN REWARD

1. Pengumpulan dana

Pengumpulan dana untuk kegiatan pemberian *reward* ini dilakukan oleh pengurus LP3MP bidang dana. Pengumpulan dana sudah dimulai dari tahun Agustus 2010. Pengumpulan dana ini sebelumnya sudah dibahas pada Musyawarah Nagari. Pengurus LP3MP meminta bantuan dari masyarakat dan para perantau yang tergabung dalam Ikatan Warga Taruang-taruang (IWARTA).

Bantuan yang diberikan oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tetap ditetapkan sejumlah Rp 10.000 sampai Rp 100.000. Untuk mengumpulkannya Pengurus LP3MP mendatangi rumah masyarakat, setiap bulan. Selain bantuan tersebut, juga diterima infak, zakat, sedekah yang langsung diberikan kepada pengurus oleh masyarakat. Bantuan dari para perantau dikoordinir oleh IWARTA masing-masing daerah seperti Solok, Padang, Jakarta, Pekanbaru, Medan dan diserahkan kepada pengurus LP3MP. Infak, zakat dan sedekah yang diperoleh pada saat hari besar agama seperti Idul Fitri dan Idul Adha juga dialokasikan untuk menambah dana yang dikumpulkan oleh LP3MP, dengan catatan

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana yang dikumpulkan oleh pengurus diserahkan kepada bendahara LP3MP, selambat-lambatnya 3x24 jam setelah uang diterima. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembukuan. Dana yang telah terkumpulkan tersebut untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh LP3MP dan pemberian *reward*.

Berdasar data yang diperoleh dari tahun 2011-2016, sejumlah 96 orang masyarakat yang telah mendapatkan, dan masing-masing penerima memperoleh Rp1.000.000. Total dana yang telah dikeluarkan untuk pemberian *reward* tersebut sebesar Rp 96.000.000. Untuk rincian pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

No	Tahun	Jumlah Penerima Reward	Dana reward
1.	2011	11	Rp 11.000.000
2.	2012	13	Rp 13.000.000
3.	2013	27	Rp 27.000.000
4.	2014	16	Rp 16.000.000
5.	2015	16	Rp 16.000.000
6.	2016	13	Rp 13.000.000
Jumlah		96	Rp 96.000.000

Sumber: Dokumen LP3MP Nagari Taruang-taruang Kec. IX Koto Sungai Lasi, Kab. Solok, 2016

Berdasarkan data tersebut jumlah penerima *reward* paling besar dibandingkan tahun lainnya. Pada saat itu dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan perantau tidak cukup untuk memberikan *reward*, cara yang ditempuh pengurus LP3MP dengan mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2013 tersebut bantuan dari Pemerintah Kabupaten Solok diperoleh sebesar Rp 10.000.000 dan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 7.500.000.

Persoalan keterbatasan dana juga dirasakan sebagai kendala oleh pengurus. Seperti mengumpulkan bantuan dari masyarakat, hal ini dikarenakan fluktuatif pendapatan masyarakat. Pengurus LP3MP menyadari tidak mungkin sepenuhnya mengandalkan bantuan dari masyarakat dan

perantau, sehingga Nagari menargetkan membuka unit usaha budidaya ikan. Usaha ini pernah dibangun di tanah Nagari yang dibuatkan kolam ikan, namun tahun 2015, dinding kolam tersebut jebol disebabkan oleh banjir.

2. Pendataan Calon Mahasiswa Lulus Seleksi PTN

Pendataan calon mahasiswa lulus seleksi PTN dilakukan oleh bidang pendidikan. Pendataan dilakukan dengan mencari informasi dan menerima laporan dari masyarakat jika terdapat keluarga, kerabat dan tetangga mereka yang diterima di PTN. Pendataan dilakukan dengan cara memperlihatkan bukti lulus seleksi PTN. Disamping bukti lulus seleksi diminta melengkapi berkas administrasi seperti foto dan membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan belajar sungguh-sungguh, rajin, tidak terlibat dalam tawuran dan penyalahgunaan narkoba, serta akan tetap mengabdikan pada Nagari Taruang-taruang.

Data yang terkumpul direkap dan akan dilaporkan pada kegiatan-kegiatan Nagari, seperti musyawarah nagari, diumumkan setelah penyelenggaraan sholat idul fitri dan idul adha. Tujuannya agar masyarakat dapat selalu mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh LP3MP. Selain itu pelaporan jumlah penerima *reward* diharapkan akan menstimulus masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi.

3. Penyerahan *Reward*

Penyerahan *reward* dilakukan di gedung serbaguna Nagari Taruang-Taruang. Waktu penyerahan dilakukan sebelum keberangkatan calon mahasiswa baru melakukan registrasi di kampus. Waktu penyerahan *reward* disampaikan kepada keluarga penerima *reward*, penerima dianjurkan untuk mengikuti acara penyerahan tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Nagari, KAN, Bamus dan para undangan lain.

Kegiatan ini diawali dengan laporan kegiatan LP3MP, penyampaian materi motivasi yang narasumbernya merupakan masyarakat dan perantau Nagari Taruang-taruang yang berhasil agar meningkatkan semangat penerima *reward* tersebut. Selanjutnya *reward* sejumlah Rp 1.000.000

permasing-masing penerima diserahkan. Sebagai bukti telah diserahkan *reward*, calon mahasiswa beserta orang tua/wali menandatangani bukti penerimaan. Ini menjadi dokumen kegiatan yang dilaksanakan oleh LP3MP.

Pemberian *reward* ini disadari memang belum mampu membiayai pendidikan ke perguruan tinggi bagi calon mahasiswa lulus seleksi PTN. Namun perhatian yang diberikan oleh LP3MP dapat meningkatkan spirit bagi masyarakat nagari Taruang-taruang melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. Spirit ini diharapkan menyebar kepada seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Pendidikan diyakini sangat penting yang merupakan modal dasar manusia oleh masyarakat Nagari Taruang-taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Keyakinan masyarakat sejalan dengan indikator pembangunan manusia yang dikenalkan oleh Human Development Index (HDI), yang mengemukakan indikator pembangunan manusia adalah: harapan hidup, perolehan pendidikan dan pendapatan (Mikkelsen, 2003). Pendidikan menjadi faktor penentu kualitas SDM.

Masyarakat dan pemerintah nagari, mengidentifikasi persoalan yang dialami oleh masyarakat dan salah satunya ditemukan rendahnya SDM. Dari sana dirumuskan langkah nyata dengan membentuk LP3MP. Upaya mengidentifikasi persoalan yang dialami masyarakat, bersama-sama mencari alternatif pemecahan persoalan, merupakan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, tanpa ada program pemerintah. Kegiatan ini terus berlanjut karena masyarakat menemukan solusi pemecahan persoalan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif; Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- Firdaus, F. (2016). Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial Pada Kelompok Masyarakat Kawasan Hutan Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, NTT. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 13–22.

- Firdaus, F., Yasin, F., & Anggreta, D. K. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Multikulturalisme Melalui Pendidikan Untuk Menyasati Masalah Multikultur Di Indonesia & Malaysia. In R. Saemah, A. Syafrimen, Alias, Y. Faridah, W. A. Jamalulail, I. S. Wekke, ... Z. Mahamod (Eds.), *ASEAN Comparative Education Research Conference (ACER-N 2015)* (pp. 1755–1767). Selangor, Malaysia: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Kurniawati, D. P., Supriyono, B., & Hanafi, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 9–14.
- Maliki, Z. (2010). *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mikkelsen, B. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Republik Indonesia, M. H. dan H. A. M. Peraturan Pemerintah Tentang Wajib Belajar, Pub. L. No. 47 (2008). Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, S. N. Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Republik Indonesia.
- Sidik, F. (2015). Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1).
- Ulumiyah, I., Gani, A. J. G., & Mindarti, L. I. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 890–899.